



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AGUSTUS 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas Berkat dan AnugerahNya, Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Manokwari.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok pikiran yang di latar belakang oleh isu – isu strategis pada sector pendidikan dan kondisi riil di lapangan. Kondisi tersebut disesuaikan dengan indicator – indicator serta peraturan yang berlaku dengan periode 5 (lima tahun) sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari merupakan pedoman, arah bagi SKPD dalam penyelenggaraan di sector pendidikan untuk mencapai tujuan, yang bermuara pada meningkatnya kinerja SKPD. Dengan demikian diharapkan akan memacu percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dari SKPD yang terkait dengan sector pendidikan, serta masyarakat secara umum dan khususnya dari dunia usaha dan pendidikan tinggi. Dukungan dapat berupa sarana untuk skala teknis pelaksanaan program serta berbagai dukungan kerjasama terkait proses pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan.

Dokumen rencana strategis yang disusun oleh tim penyusun di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 - 2020 merupakan dokumen publik yang selalu mengharapkan masukan penyempurnaan, baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan tim penyusun dimasa yang akan datang.

Demikian atas perhatian dan dukungan semua pihak disampaikan terima kasih.

Manokwari, Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari

BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710610 199303 1 009

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika	4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	11

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3. Telaahan Renstra Kemendiknas	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	54

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan	56
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	57
4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	59

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

5. 1 Penyajian menggunakan Tabel	71
--	----

BAB VI : PENUTUP

6.1 Penutup.....	76
------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari sebagai SKPD penyelenggara layanan Pendidikan dan Kebudayaan harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib dipedomani oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Manokwari Periode 2016-2020

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kabupaten Manokwari.

Tujuan penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020 sebagai landasan/pedoman bagi seluruh stakeholders pendidikan, penyusunan Renja dan penganggarnya, penguatan peran para **stakeholders** dalam pelaksanaan Renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra ini ditampilkan dalam dokumen dengan isi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kemendiknas;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan;
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
- 4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

- 5.1 Penyajian menggunakan Tabel.

BAB VI : PENUTUP

6.1 Penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Pembentukan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari, maka ditetapkan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Manokwari.

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum untuk melaksanakan sebagian tugas/ kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan wilayah kerja tertentu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017. Dikatakan dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari berdasarkan dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dan Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Manokwari, seperti bagan di bawah ini

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANOKWARI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil kajian capaian kinerja pendidikan selama lima tahun, ditemukan berbagai permasalahan dalam pencapaian kinerja, dan harus mendapat perhatian untuk memastikan pencapaian kinerja untuk lima tahun kedepan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upaya perluasan **akses pendidikan anak usia dini (PAUD)** masih cukup lambat, terbukti hingga tahun 2016, terdapat 59 lembaga TK dari 173 kampung (rasio setiap TK melayani 3 kampung) yang 30 lembaga diantaranya ada di Distrik Manowari Barat. Bahkan Distrik Warmare dengan 24 kampung, belum tersedia lembaga TK. Lembaga PAUD lain yang cukup banyak jumlahnya adalah kelompok bermain dengan 126 lembaga. Jika memperhatikan rasio jumlah murid terhadap sekolah, maka rata-rata setiap sekolah menampung 38,9 siswa atau mendekati 40 siswa, sehingga jika TK masing-masing mengelola 2 kelas, maka setiap kelas menampung sekitar 20 siswa. Jika memperhatikan pertumbuhan jumlah siswa dan guru yang menunjukkan jumlah siswa yang cenderung tetap, tetapi pertumbuhan guru terjadi secara signifikan.

Percepatan perluasan akses pendidikan di kampung dalam kategori kawasan terpencil dan sangat terpencil, berhadapan dengan peraturan pemerintah, karena belum ada secara khusus regulasi otsus yang memberikan kepastian penyediaan layanan ini sebagai pendidikan layanan khusus, serta penetapan TK sebagai wajib belajar.

- b. Perluasan layanan pendidikan dasar pada **jenjang sekolah dasar** belum dapat dicapai, meskipun Kabupaten Manokwari telah kehilangan sebagian besar wilayahnya yang menjadi tiga kabupaten pemekaran baru. Hingga saat ini, dari 173 kampung, baru 78 kampung yang telah terlayani SD atau 45%, sehingga masih terdapat 95 kampung yang belum terlayani SD. Kendala penyediaan adalah jumlah penduduk usia sekolah yang kecil tetapi terpencar sehingga tidak dapat disediakan layanan reguler karena justru akan sangat jauh dari permukiman mereka dan dapat mengundang bahaya bagi anak-anak. Dari yang telah tersedia saat ini, terdapat kekurangan kelas dibanding rombel meski secara rata-rata tidak terlalu besar, dan termasuk penyediaan perpustakaan, Kit IPA, dan buku yang masih sangat kurang. Rasio siswa per guru, siswa per rombel dan guru per rombel menunjukkan rata-rata rasio yang masih dibawah batas maksimal. Dari penyediaan layanan akses ini, diperoleh angka partisipasi pendidikan di tahun

2016 masing-masing APK 118,22% naik dari 109,30% di tahun 2015, APS 7-12 tahun sebesar 95,63% di tahun 2016 turun dari 98,11% di tahun 2015, dan APM sebesar 95,63% di tahun 2016 turun dari 97,61% di tahun 2015.

Disisi mutu, ketidakhadiran guru dan kepala sekolah serta masih belum meratanya kompetensi guru dan kehadiran pengawas di sekolah yang rata-rata 2 bulan sekali, menyebabkan rendahnya kemampuan baca tulis siswa kelas awal, yang berdasarkan penilaian EGRA di 20 sekolah pinggiran dan terpencil di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa 3 dari 20 siswa kelas 2 dan 1 dari 5 siswa kelas 3 mampu memahami bacaan dengan benar, 2 dari 5 siswa kelas 2 dan 3 mampu menyimak dengan benar dan 1 dari 5 siswa kelas 2 dan 1 dari 4 siswa kelas 3 mampu dikte dengan benar. Kondisi kualifikasi guru menunjukkan bahwa hingga tahun 2015, 72% guru telah berkualifikasi S-1 dan sisanya 28% masih dibawah kualifikasi S-1, bahkan 19% atau 225 guru masih berpendidikan SMA atau kebawah. Terdapat 453 guru yang telah tersertifikasi atau setara dengan 38,4%, sehingga sebagian besar guru SD masih belum tersertifikasi. Dari 117 SD, baru 4 yang terakreditasi A, 18 dengan B, 10 dengan C dan sisanya 85 sekolah belum terakreditasi.

Perluasan layanan jenjang SMP disediakan dengan memperhatikan ketersediaan lulusan jenjang sekolah dasar, sehingga sepanjang percepatan penyediaan layanan SD tidak terjadi, maka pertumbuhan kebutuhan perluasan SMP menjadi tidak mendesak. Hingga tahun 2015, terdapat 35 lembaga SMP yang berkedudukan di 27 kampung, dengan rasio rata-rata setiap SMP melayani 5 kampung. Meskipun dari sisi ketersediaan masih sangat timpang karena ketersediaan paling banyak di Distrik Manokwari Selatan, dan distrik lain dengan setiap sekolah jauh diatas 10 kampung. Daya tampung SMP untuk menerima lulusan SD sebagai kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. Dampak dari penyediaan layanan ini adalah pencapaian partisipasi pendidikan masing-masing APK sebesar 91,88% di tahun 2016 naik dari 76,57% di tahun 2015, APS 13-15 tahun 98,01% di tahun 2016 naik dari 97,88% dan APM 74,06% di tahun 2016 naik dari 69,34% di tahun 2015.

Sebagian besar guru SMP (90%) telah berkualifikasi S-1 dengan 45,77% diantaranya telah tersertifikasi. Sebaran guru mata pelajaran cukup baik dengan masih dibutuhkan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Distrik Manokwari Barat, Selatan dan Prafi dengan total 7 orang guru. Selain itu dibutuhkan pula guru Matematika 2 orang di Distrik Warmare. Terjadi kekurangan guru untuk seni, pendidikan jasmani, TIK dan Mulok di seluruh distrik. Dari 41 SMP (35 umum, 4 SMPTK, dan 2 MTs) yang ada di Kabupaten Manokwari, hampir separuh diantaranya belum terakreditasi, sehingga perlu diperhatikan pencapaian kinerja ini. Baru 4 sekolah yang terakreditasi A, 12 akreditasi B, dan 3 akreditasi C.

- c. **Pendidikan Non-Formal** masih belum dilihat sebagai salah satu jenis pendidikan alternatif yang dapat berperan signifikan dalam percepatan pencapaian target wajib belajar 9 tahun atau bahkan 12 tahun sesuai dengan mandat otsus. Pendidikan kesetaraan masih dilihat sebagai pelengkap pendidikan formal, padahal dapat sebagai pengungkit percepatan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dari perkembangan pelaksanaan Program Kesetaraan, rata-rata tingkat kelulusan ujian kesetaraan oleh 13 PKBM adalah 86,5% dari 1052 warga belajar pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Dari 13 penyelenggara pendidikan kesetaraan ini hanya satu saja yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kejar paket A.

Hingga tahun 2015, **angka melek aksara** dewasa 15+ adalah 93,21% setara dengan 97.971 jiwa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,7%. Dengan demikian, jumlah buta aksara dewasa sebanyak 7.137 jiwa. Di tahun 2015, terdapat 1030 warga belajar menerima layanan pendidikan keaksaraan fungsional oleh 7 PKBM dan dilanjutkan ke KUM sesuai kelulusannya.

Untuk tahun 2016, kegiatan dilaksanakan oleh 11 PKBM dengan sasaran garapan 1650 warga belajar, dan bagi yang lulus SKKD dapat melanjutkan ke Kejar Paket A setara SD setara kelas IV. Diharapkan akan terjadi penurunan jumlah buta aksara dalam waktu 5 tahun kedepan. Kabupaten Manokwari juga menyelenggarakan Kelompok Usaha Mandiri (KUM) sebagai kelanjutan SUKMA-1 selain penyediaan Taman Bacaan Masyarakat meskipun masih belum merata.

Jika memperhatikan **Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pelatihan** di Kabupaten Manokwari, terdapat 15 penyelenggara dan memiliki keanekaragaman jenis ketrampilan yang disediakan. Diharapkan lembaga ini akan memberikan manfaat dengan memberikan ketrampilan bagi anak muda sehingga dapat bersaing dengan baik di dunia kerja yang semakin kompetitif.

- d. Pendidikan **In_Formal**, telah diselenggarakan melalui pelatihan bagi berbagai kelompok perempuan. Pendidikan jalur informal lebih fokus pada upaya penyediaan sikap moral dalam kehidupan berdasarkan latar belakang budaya lingkungan sosial dan agama masing-masing keluarga yang bertujuan membangun karakter anak. Pelaksananya diselenggarakan oleh lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat melalui penanaman nilai-nilai moral dan keteladanan. Pendidikan Informal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui pelatihan bagi para pelaku dimasing-masing jenjang pendidikan, dengan sasaran 451 orang dari seluruh jenjang dan jenis pendidikan.
- e. **Kebudayaan**, Dalam rangka untuk mempublikasikan budaya-budaya di Kabupaten Manokwari

agar budaya-budaya ini terpublikasi terkendala hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang Kebudayaan
 2. Terbatasnya Anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan.
 3. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung nilai-nilai budaya.
 4. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data-data kebudayaan.
 5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang ingin menggali budaya-budaya daerah.
 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kebudayaan.
- f. **Keuangan Daerah**, tidak menunjukkan trend pertumbuhan yang signifikan, sehingga target kinerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran.

3.2 TELAHAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari pada Desember 2015 yang lalu, Pasangan **Bupati Demas Paulus Mandacan, S.Sos, M.Ec.Dev** dan **Wakil Bupati Drs.Edy Budoyo** berhasil memenangi pemilihan langsung tersebut. Adapun visi yang diusung oleh pasangan kepala daerah ini adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera**. Visi ini diterjemahkan dalam 7 misi masing-masing sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,
- 3) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tataruang wilayah,
- 4) Memantapkan pembangunan kampung,
- 5) Memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok, dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan,
- 6) Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat,
- 7) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Dari ketujuh misi tersebut maka yang terkait dengan pengembangan kebijakan pembangunan pendidikan adalah misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Misi tersebut di atas muncul sebagai response atas permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Manokwari, khususnya yang langsung berkaitan dengan kebijakan pendidikan adalah;

- 1) masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan pendidikan dan penambahan guru-guru exacta bagi SMP dan SMA,
- 2) masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan prioritas penanganan rumah tangga miskin (RTM),
- 3) masih banyaknya masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang diakibatkan tingginya pengangguran.

Dari kondisi di atas, maka prioritas agenda program pembangunan dibidang pendidikan diprioritaskan untuk:

- 1) peningkatan jumlah guru IPA dan Matematika khususnya untuk jenjang SMP,
- 2) penyediaan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa untuk studi akhir,
- 3) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN RENSTRA PROVINSI PAPUA BARAT

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategisnya untuk periode 2015-2019. Visi yang ditetapkan adalah ***membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter berlandaskan gotong royong***. Terdapat Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah;

- 1) Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan dalam menjalankan interaksi para pelaku pembelajaran dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Guru sebagai penyemangat, sebagai guru yang mumpuni dengan empat kompetensinya, pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, tetapi juga sensitif dalam memfasilitasi kemampuan dan perkembangan siswanya
- 3) Orang tua yang terlibat aktif, dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik anak sebelum

dan setelah jam sekolah, sehingga fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak dapat terlaksana dengan baik melalui pendidikan keluarga. Keterlibatan orang tua secara aktif akan meningkatkan efektivitas pembelajaran

- 4) Masyarakat yang sangat peduli, melalui partisipasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan mandiri dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku atau mendukung penyelenggaraan pendidikan milik pemerintah
- 5) Industri yang berperan penting, selain dalam hal dukungan finansial, tetapi industri berperan penting dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Industri berkepentingan untuk memperoleh tenaga kerja terampil sesuai tuntutan dunia usaha
- 6) Organisasi profesi yang berkontribusi besar, dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan akan mendorong perbaikan mutu pendidikan
- 7) Pemerintah yang berperan optimal, melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai sesuai jaminan undang-undang dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah berperan dalam menyediakan akses, dan mutu pendidikan serta relevansi pada tuntutan kehidupan terutama dalam memenuhi SPM termasuk tenaga pendidik yang berkualitas.

Dari elemen ekosistem pendidikan di atas ditetapkan misi sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat,
- 2) Mewujudkan akses yang luas, merata, dan berkeadilan,
- 3) Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu,
- 4) mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa,
- 5) Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Misi pendidikan tersebut juga sesuai dengan tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat 2012-2016 lebih fokus pada upaya memberikan dukungan bagi kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu dalam bingkai otonomi khusus bagi Papua Barat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RTRW Kabupaten Manokwari sesuai Perda jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah atas masalah dalam pencapaian kinerja berdasarkan Tupoksi, telaah Renstra Kemdikud dan Provinsi serta Telaah rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka ditetapkan isu-isu strategis. Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya ketersediaan layanan Satuan PAUD Dikmas dan pendidikan dasar (SD dan SMP) khususnya untuk kampung yang masuk dalam kategori wilayah pinggiran dan terpencil
2. Rendahnya kemampuan membaca dan menulis siswa kelas awal SD yang mempengaruhi mutu pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi akibat berbagai faktor
3. Berbagai masalah masih melilit guru dan kepala sekolah yang menyebabkan tingginya ketidakhadiran guru dan kepala sekolah akibat ketiadaan rumah guru/kepala sekolah, tidak transparansinya pengelolaan dana sekolah, rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial dan pendidikan), pengawasan yang rendah, dan ketiadaan standar penghargaan menyebabkan demotivasi kerja bagi guru dan pegawai secara umum.
4. Rendahnya cakupan sekolah terakreditasi, akibat rendahnya kuota dan rendahnya (ketiadaan) dukungan pendanaan dari pemerintah daerah kabupaten dalam memperbesar cakupan akreditasi tersebut.
5. Kehadiran pengawas disekolah masih sangat rendah akibat dari ketiadaan dukungan dana transportasi bagi pengawas untuk menjalankan perannya dalam melaksanakan supervisi guru dan sekolah, termasuk meningkatkan mutu KKG dan MGMP
6. Pendidikan kesetaraan belum dianggap strategis sebagai alternatif pendidikan formal dalam mempercepat peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

7. Cakupan kerja pendidikan keaksaraan fungsional selama ini, tidak cukup cepat dalam mendorong upaya tuntas buta aksara dewasa
8. Terbatasnya jenis bidang keahlian dari pendidikan ketrampilan tidak cukup mampu mendorong transformasi ketenagakerjaan
9. Belum dijalankannya dengan baik pendidikan In-formal sebagai upaya membangun karakter anak bangsa
10. Perlu peningkatan mutu tatakelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari dalam menjalankan peran regulator pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat
11. Perlu penyediaan (pemberian) makan pagi dan siang bagi siswa SD di kawasan pinggiran, terpencil dan pedalaman (sangat terpencil) untuk meningkatkan daya dukung terhadap hasil pembelajaran
12. Meningkatkan peran dan dukungan orang tua pada pendidikan
13. Melakukan distribusi guru proporsional dengan fokus pada kompetensi guru, dan pemenuhan guru mulok dan seni budaya yang ketersediaannya sangat terbatas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pendidikan, serta tantangan dan kekuatan lembaga, maka ditetapkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Periode 2016-2020 adalah **TERSELENGGARANYA LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG KONTEKSTUAL, BERMUTU DAN MERATA SEBAGAI BAROMETER PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANOKWARI.**

Yang dimaksud dengan **Layanan pendidikan dan Kebudayaan yang kontekstual, bermutu dan merata** adalah bahwa tugas pokok SKPD sesuai mandat konstitusi adalah menyelenggarakan layanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan kekhususan dan latarbelakang sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Manokwari, termasuk kondisi geografisnya. Hal ini perlu dipastikan, sehingga penyelenggaraan layanan pendidikan yang disediakan menjadi lebih bermanfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Layanan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Manokwari setelah pemekaran Daerah Otonomi Baru adalah fokus pada penyediaan layanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Meskipun saat ini masih banyak kampung di Kabupaten Manokwari yang masuk dalam kategori pinggiran dan terpencil, tetapi mutu yang disediakan tidak boleh dinomor duakan. Ini harus menjadi perhatian bersama, demi memastikan tersedianya generasi baru yang berdaya saing tinggi dan memenangi kompetisi.

Yang dimaksud **sebagai barometer mutu pendidikan di Kabupaten Manokwari** adalah bahwa pencapaian pemerataan mutu pendidikan yang kontekstual di Manokwari yang sekaligus sebagai ibukota provinsi akan menjadi inspirasi dan acuan bagi kabupaten lain dan Provinsi Papua Barat. Keberadaan kampus UNIPA sebagai perguruan tinggi negeri di Papua Barat menjadi salah satu variable pendorong kawasan cepat tumbuh yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor informal.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menetapkan misi sebagai berikut:

Misi Pertama: Menyediakan layanan pendidikan kontekstual yang bermutu, merata dan terjangkau secara inklusif

Dari misi ini terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan sebagai organisasi dibentuk untuk

menjalankan misi utamanya yaitu menyelenggarakan layanan pendidikan secara bermutu pada semua jenjang dan jalur sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Manokwari secara inklusif. Pendidikan kontekstual disini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menggunakan pendekatan dan muatan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya dalam menjawab tantangan kehidupan

Misi Kedua: Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang baik (Good Educations Governance)

Dalam misi ini menggambarkan bahwa pengelolaan pendidikan hanya akan dapat mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh dukungan masyarakat jika dikelola secara profesional. Hal ini akan menjamin sumberdaya manusia yang kompeten dan berintegritas dan berdedikasi tinggi pada pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang mengarah pada perubahan yang jelas dan terukur. Transparansi dan akuntabilitas ini akan mendorong partisipasi dan rasa percaya dan penghargaan bagi kinerja pemerintah.

Misi Ketiga: Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mengembangkan seni dan budaya yang berdaya saing;

Dari misi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari selaku pembina dan penyelenggara seni dan budaya berupaya membentuk manusia yang berkarakter tangguh dan profesional dalam melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai budaya yang berdaya saing ;

Misi Keempat: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan keragaman dan kekayaan nilai-nilai budayadan warisan daerah;

Dalam misi ini diharapkan pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan keragaman dan kekayaan nilai-nilai budaya dan warisan daerah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

A. Tujuan

Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan antara Misi dengan Tujuan adalah, jika misi berbicara tentang tujuan dari keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari periode tahun 2016-2020 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas.

Misi Pertama: Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau secara inklusif dengan rumusan tujuan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- 3) Tersedianya layanan pendidikan non-formal melalui pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional serta pendidikan ketrampilan dan bermatapencaharian
- 4) Terselenggaranya pendidikan informal melalui pendidikan karakter melalui pembiasaan perilaku positif dan keteladanan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat

Misi Kedua: Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang baik (Good Educations Governance), dengan rumusan tujuan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu penyelenggara layanan pendidikan yang profesional dan akuntabel
- 2) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan

Misi Ketiga : Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mengembangkan seni dan budaya yang berdaya saing; dengan rumusan tujuan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan kekayaan budaya daerah
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan keragaman budaya daerah

Misi Keempat: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan keragaman dan kekayaan nilai-nilai budayawan warisan daerah; dengan rumusan tujuan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas nilai budaya daerah
- 2) Meningkatkan kapasitas pembangunan seni dan budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Capaian PAD.

- 3) Meningkatkan budaya ditengah-tengah publik agar budaya daerah dikenal oleh masyarakat luas.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Misi Pertama: Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
T1	Tersedia dan terjangkau layanan Satuan PAUD	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau per kampung	Rasio PAUD per Kampung	0	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
			APK TK (4-6 tahun)	0	81,16	85,16	89,16	93,16
			% guru TK yang sesuai kompetensi	0	51,77	61,77	71,77	82
		Meningkatnya kualitas gizi siswa TK	% siswa TK meningkat kualitas kesehatan nya (anemia, dll????)	0	0	0	0	0
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan	AKSES DIKDAS					
			APM SD/MI/ Paket A	0	97,56	98,56	99,11	100%
			APM SMP/MTs/ Paket B	0	75,34	78,68	82,02	85%
			Proporsi Kampung dengan berbagai bentuk layanan SD	0	1,4	1,4	1,4	1,4
			Rasio ketersediaan SMP per Distrik	0	4	4	4	4
			% SD dengan toilet dan air bersih	0	20	20	20	20
			% SMP dengan toilet dan air bersih	0	25	25	25	25
			% Ruang kelas rusak berat SD	0	2	2	2	2
			% ruang kelas rusak berat SMP	0	2	2	2	2
			% SD pingiran & terpencil dengan rumah guru dan	0	15	15	15	15

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
			kasek					
			% SMP pinggiran dan terpencil dengan rumah guru dan kasek	0	11	11	11	11
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0	<1%	<1%	<1%	<1%
			Angka Putus Sekolah SMP	0	<1%	<1%	<1%	<1%
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	0	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA/K	0	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
			MUTU DIKDAS					
			% SD dengan buku paket dengan rasio buku/ siswa 1:1	0	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
			% SD dengan Perpustakaan, sudut baca	0	20%	20%	20%	20%
			% SMP dengan perpustakaan dan sudut baca	0	25%	25%	25%	25%
			%Tingkat ketidakhadiran siswa SD	0	5	5	5	5
			% siswa meningkat daya tahan konsentrasinya	0	80	80	80	80
			% Tingkat ketidakhadiran siswa SMP	0	4	4	4	4
			%Tingkat kemampuan baca tulis kelas awal SD	0	5,45	5,45	5,45	5,45
			% SD reguler yang belum memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	0	4	4	4	4
			% SD reguler yang belum memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	0	8	8	8	8
			% SMP yang belum menerapkan MBS	0	0	0	0	0
			% SMP reguler yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 $\geq$ 70%	0	14	14	14	14
			% SMP reguler yang	0	8	8	8	8

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
			belum memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan belum memiliki sertifikat pendidik >35%					
			% Kepala SD yang belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	0	7	7	7	7
			% Kepala SMP yang belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	0	3	3	3	3
			Meningkatnya budaya baca bagi siswa pendidikan dasar	0	1	1	1	1
			% SD reguler yang belum terakreditasi	0	25	25	25	25
			% SMP reguler yang belum terakreditasi	0	6	6	6	6
T3	Tersedianya layanan pendidikan non-formal melalui pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional serta pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah	Proporsi peserta paket A dibanding penduduk usia 7-12 tahun yang belum bersekolah	0	0	0	0	0
		Peserta paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah	%Proporsi peserta paket B dibanding penduduk usia 13-15 tahun yang belum bersekolah	0	4	4	4	4
		Lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B	% lulusan paket A lanjut ke SMP/ paket B	0	0	0	0	0
		Lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi SMA/K atau Program Paket C	% lulusan paket B yang lanjut ke Paket C atau SMA/K	0	4	4	4	4
		Tingkat melek aksara dewasa 15+	% AMHD 15+ tahun	0	2	2	2	2
		Tingkat partisipasi anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra	% partisipasi kursus ketrampilan dari anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran,	0	2	2	2	2

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
		sejahtera sebagai peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	dan dari keluarga pra sejahtera					
		Lembaga kursus/pelatihanyang dibina secara terus menerus	% lembaga kursus/pelatihan yang dibina berkelanjutan	0	8	8	8	8
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang memperoleh sertifikat	% lulusan bersertifikat	0	70	70	70	70
T4	Terselenggaranya pend.informal melalui pembiasaan perilaku positif dan keteladanan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, keluarga dan ling.masyarakat	Tingkat keterlaksanaan kurikulum pendidikan karakter	% sekolah yang menjalankan pendidikan karakter melalui disiplin positif dan keteladanan di sekolah	0	3	3	3	3
			% rumah tangga pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan rumah tangga	0	7	7	7	7
			% kampung (sub kampung) sebagai pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat	0	0	0	0	0

Misi Kedua: Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang baik (Good Educations Governance)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
T1	Tersedianya penyelenggaraan layanan pendidikan yang profesional dan akuntabel	Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah	% Kehadiran guru SD	0	93	93	93	93
			% kehadiran guru SMP	0	97	97	97	97
			% kehadiran kepala SD	0	95	95	95	95
			% kehadiran kepala SMP	0	98	98	98	98
		Tingkat supervisi pengawas di sekolah	% kehadiran pengawas SD dgn 3 jam per sekolah per bulan	0	90	90	90	90
			% kehadiran pengawas SMP Per Sekolah	0	90	90	90	90
		Sekolah yang transparan dan	% SD dengan LKT (laporan Keuangan Terpadu)	0	0	0	0	0

		akuntabel mengelola keuangan sekolah	% SMP dengan LKT (Laporan Keuangan Terpadu)	0	0	0	0	0
		LAKIP	Ketersediaan dokumen LAKIP Dinas Pendidikan yg tepat waktu	1	1	1	1	1

Misi Ketiga: Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mengembangkan seni dan budaya yang berdaya saing

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
T1	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan kekayaan budaya daerah	Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman produk seni budaya dan perfilman di daerah	Tersedianya sarana yang representatif bagi upaya pelestarian sejarah purbakala (paket BCB/Situs/KCB)	0	1	1	1	0
			Tersedianya karya seni dan budaya yang dapat menjadi sarana bagi pengembang kebudayaan dan pariwisata (film dan tugu)	0	3	2	1	0
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Museum Daerah beserta Benda Cagar Budaya (BCB)/ Situs/ Kawasan Cagar Budaya	Tersedianya perangkat dan pengelola database sistem informasi sejarah purbakala (orang)	0	4	0	0	0
T2	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas	Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas para pelaku seni budaya di daerah	Meningkatnya apresiasi/ upaya pemberdayaan terhadap para pelaku dan penggiat seni budaya di daerah dari 48 menjadi 85 sanggar/ group.	0	6	8	10	13

	pengelolaan keragaman budaya daerah	Meningkatnya ketersediaan sarana/ fasilitas/ media/wadah bagi pengembangan seni budaya daerah	Terselenggaranya konsolidasi kebudayaan daerah yang mengutamakan kebersamaan dalam keragaman (orang)	0	0	70	0	0
			Meningkatnya keikutsertaan sanggar/ group dalam mengikuti festival maupun pesta budaya ditingkat daerah maupun nasional dari 9 menjadi 27 sanggar dan terselenggaranya festival di daerah sebanyak 2 festival (sanggar/ group)	2	6	4	6	2

Misi Keempat: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan keragaman dan kekayaan nilai-nilai budayadan warisan daerah;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:				
				1	2	3	4	5
T ₁	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas nilai budaya daerah	Bertambahnya internalisasi, revitalisasi dan rektualisasi nilai budaya yang mendukung pembangunan dan karakter pekerti masyarakat di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan di bidang kemasyarakatan yang berbasis pada adat budaya daerah	1	1	1	1	1
			Tersedianya wadah untuk mengapresiasi kekayaan seni dan budaya daerah	0	105	100	155	200
		Meningkatnya apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya daerah didalamnya juga mencakup upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dan nilai tradisional	Tersediannya hasil penulisan dan penelitian yang merupakan hasil kajian ilmiah yang menggali kekayaan seni dan kebudayaan daerah (hasil penelitian/judul hasil penelitian/judul kamus)	0	7	5	2	1
			Terdapatnya sejumlah juru pemelihara situs/BCB yang mendapatkan apresiasi/penghargaan (orang)	10	10	10	10	10
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Museum Daerah berserta Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs/Kawasan Cagar Budaya	Tersedianya perangkat dan pengelola database sistem informasi sejarah purbakala (orang)	0	4	0	0	0

T2	Meningkatkan kapasitas pembangunan seni dan budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap capaian PAD	Memperbesar nilai jual dan daya saing yang berimplikasi pada bertambahnya pemasukan (PAD)	Meningkatnya kualitas destinasi seni dan budaya unggulan yang representatif dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional	30	65	100	0	0
		Menambah dan mengembangkan kapasitas pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Manokwari secara kualitatif dan kuantitatif	Tersedianya sejumlah fasilitas pendukung seni dan budaya unggulan	0	2	2	0	0
			Meningkatnya keberadaan seni dan budaya	0	1	1	1	1
T3	Meningkatkan budaya ditengah-tengah publik agar budaya daerah dikenal oleh masyarakat luas	Memperkenalkan potensi budaya di wilayah Kabupaten Manokwari secara regional, nasional maupun internasional	Meningkatnya upaya memperkenalkan potensi budaya daerah melalui kegiatan promosi.	0	1	0	0	1

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan dengan strategi dan sasaran sebagai berikut;

Misi Pertama: Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
T1	Tersedia dan terjangkaunya layanan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau per kampung	Mendorong kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD	Penetapan TK sebagai program wajib belajar pendidikan formal pra-SD
			Mendorong pemerintah kampung dalam mendukung penyelenggaraan PAUD sebagai bagian integrasi kinerja pemerintah kampung	
			Kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD bagi anak-anak	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Penyediaan makanan bagi siswa untuk sarapan berbasis bahan lokal	Schools Feeding
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana SD dikawasan terpencil dan sangat terpencil sesuai SPM khusus pendidikan dasar khusus bagi kawasan pinggiran, terpencil dan sangat terpencil	Penerapan SPM khusus pendidikan dasar khusus bagi kawasan pinggiran, terpencil dan sangat terpencil
			Revitalisasi KKG dan MGMP dalam peningkatan mutu pendidik kelas awal dikawasan pinggiran, terepencil dan sangat terpencil	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik pendidikan dasar melalui optimalisasi struktur yang telah ada
			Pengembangan kerjasama kelembagaan dalam percepatan kualifikasi guru secara linier	
			Penyediaan biaya personal untuk siswa dari kawasan pinggiran, terpencil dan sangat terpencil	Peningkatan pendanaan pendidikan untuk masyarakat miskin dan terpencil untuk pemenuhan biaya personal siswa (penginapan, school feeding, pakaian dst)
			Penyediaan makan pagi dan siang untuk siswa SD berbahan lokal	
			Penyediaan guru kontrak untuk sekolah tanpa guru, atau guru mankir	
			Pendelegasian sebagian komponen penyelenggaraan pendidikan PAUD dan SD sebagai urusan pemerintah kampung	Penetapan Pergub kewenangan kampung
			Sosialisasi berbasis bukti pentingnya pendidikan dasar bagi para tokoh adat	Pelibatan tokoh adat dalam peningkatan akses pendidikan yang berkelanjutan
T3	Tersedianya layanan pendidikan non-formal melalui pendidikan	Tingkat partisipasi paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI	Memastikan dukungan penyediaan beasiswa transisi dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan (lulus SKKD)	Integrasi sistem pendidikan nasional di daerah antara pendidikan non formal dan formal sebagai jalan keluar penyediaan layanan pendidikan di kawasan pinggiran,

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	kesetaraan dan keaksaraan fungsional serta pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian		melanjutkan ke Paket A atau SD reguler setara kelas 4 SD untuk anak-anak usia sekolah yang belum memperoleh akses.	terpencil dan sangat terpencil
		Tingkat partisipasi paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP	Memastikan dukungan penyediaan beasiswa transisi bagi peningkatan angka melanjutkan lulusan PAKET A ke paket B setara SMP, Paket B ke Paket C setara SMA dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket B dan C secara kontekstual Papua	
		Tingkat kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Paket A		
		Tingkat kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Paket A		
		Proporsi ulusan Program Paket A yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B		
		Proporsi ulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi SMA/K/Program Paket C		
	Tingkat melek aksara dewasa 15+	Penyediaan dukungan pedanaan dan penguatan kapasitas penyelenggara program keaksaraan fungsional 15+	Percepatan tuntas buta aksara dewasa dan perluasan cakupan layanan kursus ketrampilan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan	
	Tingkat partisipasi anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	Penyediaan dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pelatihan ketrampilan dari keluarga miskin		
	Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus			
	Lulusan kursus, pelatihan,	Kerjasama kelembagaan		

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	dengan dunia usaha dan industri serta mendorong kewirausahaan mandiri	
T4	Terselenggaranya pendidikan informal melalui pembiasaan perilaku positif dan keteladanan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat	Tingkat keterlaksanaan kurikulum pendidikan karakter	Pelibatan seluruh komponen masyarakat pelaku pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan karakter sesuai kapasitasnya	Penerbitan aturan kepala daerah terkait penetapan dan sratei pelaksanaan pendidikan karakter bagi anak-anak dan masyarakat
			Sosialisasi dan peniaian keberhasilan pelaksanaan pendidikan informal	

Misi Kedua: Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang baik (*Good Educations Governance*)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
T1	Tersedianya penyelenggaraan layanan pendidikan yang profesional dan akuntabel	Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam supervisi dan pengelolaan dana sekolah melalui uji ulang dan penempatan baru kepala sekolah	Pengangkatan atau uji ulang kepala sekolah SD/SMP serta pangawas sekolah
			Penyediaan prasarana yang mendukung kehadiran guru di sekolah seperti rumah guru dan jaminan rasa aman	Pembangunan paket sekolah dg rumah guru sebagai bagian dari paket tersebut, jaminan rasa aman dengan pelibatan masy adat/lokal
			Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	Pemantauan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
		Tingkat supervisi pengawas di sekolah	Peningkatan kompetensi pengawas dan tingkat kehadiran pengawasan	Laporan hasil pengawas dan tindaklanjut nya secara lebih interaktif
		Sekolah yg transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan sekolah	Peningkatan kapasitas pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah (BOS dll) secara transparan	Penyediaan pelatihan, sistem modul dan pendampingan oleh pengawas sekolah dalam pengelolaan dana sekolah yg transparan

		LAKIP yang berkualitas	Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja per jeselon	Penilaian berbasis kinerja sebagai dasar penilaian SP ₃
	Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan	Tingkat keterlibatan pemerintah kampung dalam percepatan penyediaan layanan PAUD dan SD serta KF di tingkat kampung	Integrasi pembangunan pendidikan dasar dalam pembangunan kampung	Penerbitan Perbup kewenangan kampung dengan mengintegrasikan upaya percepatan pembangunan pendidikan PAUD dan SD sebagai kewenangan kampung
		Keterlibatan unsur masyarakat dalam perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pendidikan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang partisipatif serta ASD yang responsife	
		Keterlibatan unsur masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan		

Misi Ketiga: Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mengembangkan seni dan budaya yang berdaya saing ;

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
T1	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan	Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman produk seni budaya dan perfilman di daerah	Mendorong dan memfasilitasi ketersediaan sarana dan karya seni/budaya yang representatif sebagai upaya pelestarian kebudayaan di daerah	Menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan secara komprehensif serta mempersiapkan dan menyediakan dukungan teknis maupun finansial sebagai upaya pelestarian kebudayaan di daerah

	kekayaan budaya daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya khususnya Museum Daerah beserta benda cagar budaya (BCB)/Situs/ Kawasan Cagar Budaya	Menyediakan perangkat dan pengelola database sistem informasi sejarah purbakala melalui pelatihan dan pembuatan sistem jaringan sejarah purbakala	Mendukung upaya peningkatan kemampuan kompetensi aparat pengelola di bidang permuseuman, sastra dan bahasa agar mempunyai kemampuan standar dalam mengelola data sejarah kepurbakalaan
T2	Meningkatkan dan Mengembangkan kapasitas pengelolaan keragaman budaya daerah	Meningkatnya Kreatifitas dan produktifitas para pelaku seni budaya di daerah	Memberikan apresiasi dan turut secara aktif memfasilitasi upaya pemberdayaan kekayaan seni dan budaya daerah oleh para pelaku dan penggiat seni budaya di daerah.	Melakukan upaya penguatan terhadap kelembagaan di bidang kebudayaan (Sanggar/group/galeri/seniman), serta turut serta secara aktif terlibat melakukan pembinaan seni budaya daerah sebagai aset dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya ketersediaan sarana/fasilitas/media/ wadah bagi pengembangan seni budaya daerah	Mengoptimalkan dan memperluas peranan maupun keikut-sertaan semua potensi dan komponen budaya dan kesenian daerah bagi pengembangan seni budaya daerah	Memperjelas dan mempertegas peran pemerintah daerah sebagai fasilitator yang turut bertanggung jawab secara konsisten mewadahi terselenggaranya kegiatan-kegiatan berbasis kesenian dan budaya (skala lokal maupun nasional) yang akan berkontribusi positif bagi pengembangan seni budaya daerah

Misi Keempat: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan keragaman dan kekayaan nilai-nilai budaya dan warisan daerah;

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
T1	Meningkatkan dan	Bertambahnya internalisasi, revitalisasi dan rektualisasi nilai budaya yang mendukung pembangunan dan karakter pekerti masyarakat di daerah	Menambah jumlah atau frekuensi kegiatan ataupun keberadaan wadah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di bidang kemasyarakatan yang berbasis pada adat dan seni budaya daerah	Memprioritaskan pemanfaatan potensi seni budaya daerah untuk menumbuh-kembangkan seoptimal mungkin kegiatan pelayanan pemerintahan di bidang kemasyarakatan yang dapat menyentuh kebutuhan seni dan budaya masyarakat

	mengembangkan kapasitas nilai budaya daerah	Meningkatnya apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya daerah didalamnya juga mencakup upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dan nilai tradisional	Melakukan penelitian dan kajian ilmiah sebagai upaya untuk menggali dan melestarikan potensi kekayaan seni dan budaya daerah disertai dengan pembinaan untuk mempertahankan kelestariannya	Melakukan upaya-upaya pengembangan dan pelestarian potensi kekayaan seni dan budaya daerah secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan peran serta komponen pemerhati kesenian dan kebudayaan daerah
T2	Meningkatkan kapasitas pembangunan seni dan budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap capaian PAD	Memperbesar nilai jual dan daya saing yang berimplikasi pada bertambahnya pemasukan (PAD)	Membangun dan menyediakan fasilitas yang representatif (kualitas maupun kuantitas) sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional	Melakukan kebijakandengan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas secara bertahap dan berkelanjutan
		Menambhan dan mengembangkan kapasitas pembangunan destinasi seni dan budaya di Kabupaten Manokwari secara kualitatif dan kuantitatif	Membangun dan menyediakan lebih banyak alternatif dengan mempertimbangkan potensi dan prospek pengembangan serta peluang investasi	Menciptakan peluang investasi yang berprospek menjadi salah satuy penggerak perekonomian daearah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, Program dapat didefinisikan secara umum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/ lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/ lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari 2016-2020, disajikan program yang merupakan pengelompokan kegiatan dengan masing-masing kegiatan pembentuk atas sasaran yang ditetapkan. Kegiatan yang ditetapkan merupakan kegiatan pembentuk sasaran yang ditetapkan dengan pendekatan kerangka kerja logis (Logical Framework Approach/LFA). Masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

1. PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI

Program Pelayanan PAUD dan PNF

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bermutu dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan dan penanganan yang mendasar guna menuntaskan pelayanan PAUD dan PNF sesuai dengan letak geografis di Kabupaten Manokwari. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Manokwari berada di ibu kota Provinsi Papua Barat, secara administrasi Kabupaten Manokwari terdiri dari 9 Distrik dan 164 Kampung serta 9 Kelurahan dengan Populasi Penduduk 154.296 jiwa. Dari jumlah tersebut Penduduk usia 0-4 tahun sebesar 17.884 jiwa.

Program PAUD dan PNF dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan anak usia dini, tenaga pendidik dan kependidikan yang adil dan merata.

Dalam menyiapkan masa persiapan anak dalam proses pembelajaran maka Bidang PAUD dan PNF melaksanakan kebijakan peningkatan pelayanan akses pendidikan untuk anak usai dini dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan PAUD, maka perencanaan kegiatan PAUD dan PNF dirincikan sebagai berikut;

- a. Penyediaan unit sekolah baru untuk TK Pembina di tingkat distrik;
Kegiatan ini berorientasi pada penyediaan akses layanan pendidikan anak usia dini yang merata di tingkat distrik sebagai upaya sekolah percontohan bagi lingkungannya.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan situasi di masing-masing kampung di distrik tersebut. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka peningkatan proses pembelajaran bagi anak usia dini untuk meningkatkan perkembangan kemampuan siswa secara emosional dan kreativitas.
- c. Memberikan dukungan sarana Alat Permainan Edukatif (APE) untuk peningkatan proses pembelajaran bagi anak usia dini;
Alat Permainan Edukatif (APE) merupakan sarana pendukung kurikulum pendidikan PAUD yang mengacu pada materi / bahan ajar, model-model pembelajaran, dan penilaian. Pengembangannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak didik, perkembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas peserta didik dan pendidik PAUD.
- d. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan lembaga penyelenggara PAUD;
Tujuannya adalah memfasilitasi pelatihan dan study banding bagi guru PAUD dan pengelola TK/RA sehingga memiliki kompetensi yang diandalkan guna peningkatan mutu peserta didik.
- e. Bekerjasama dengan masyarakat khususnya kemitraan dan untuk melaksanakan kegiatan program formal, non formal dengan sistem parenting bersama orang tua dan peserta didik
- f. Menyelenggarakan program Pendidikan kesetaraan paket A. B. dan C.

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Dalam rangka menuju pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas perlu didukung dengan program-program dan kebijakan pemerintah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan baik tenaga pendidikan maupun sarana prasarana. Dengan adanya dukungan yang cukup dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dasar sekaligus dapat menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih rendah pada pendidikan dasar dapat ditindak lanjuti dengan pelaksanaan pemerataan akses pendidikan di tingkat Kampung di setiap Distrik. Dengan pemerataan akses pendidikan yang memadai dapat menampung penduduk usia sekolah 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar dan 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama adalah pondasi dasar yang harus kita wujudkan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit, karena pendidikan menjadi hal yang mahal dan merupakan salah satunya pintu masuk menuju masyarakat yang berkarakter dan berkepribadian baik, santun serta berbudi pekerti luhur. Untuk mencapai semua itu, maka perlu di dukung dengan program dan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan pendidikan di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan gedung sekolah ditingkat SD maupun SMP di wilayah kampung di setiap Distrik;
2. Perlu adanya program perbaikan sarana sekolah yang berbentuk rehap sedang dan rehap berat pada satuan pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama;
3. Perlu adanya program pembangunan ruang kelas baru, kantor sekolah, rumah guru dan rumah penjaga sekolah bagi sekolah yang belum memiliki sarana tersebut. Untuk menuju standar pelayanan pendidikan untuk siswa SD maksimal 32 org dan SMP 36 Org, merujuk pada SPM tersebut sekolah yang berada diwilayah perkotaan yang mengalami kekurangan ruang kelas, pada satuan pendidikan dasar;
4. Untuk mendukung program MBS sekolah perlu memiliki sarana MCK dan sanitasi sesuai dengan kebutuhan sekolah;
5. Untuk mempercepat program pemerintah siswa diwajibkan membaca minimal 15 menit itu perlu dilaksanakan program pengadaan perpustakaan dan buku bacaan bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas dan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk peserta didik 1 siswa 1 buku di setiap mata pelajaran;
6. Untuk sekolah menengah pertama perlu dilengkapi adanya gedung laboratorium IPA dan peralatannya yang memadai. Sedangkan sekolah dasar perlu dilengkapi dengan alat peraga;
7. Mengarah pada manajemen berbasis sekolah(MBS) dan sekolah bermutu dan berkualitas, kami lakukan pelatihan kompetensi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta perhatian pada kesejahteraan baik di tingkat satuan pendidikan dasar;
8. Agar sekolah tidak ketinggalan informasi kami lakukan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar;
9. Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam hal ini pembinaan bakat dan minat siswa perlu di programkan kegiatan Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN);
10. Di programkan biaya retrival bagi siswa asli Papua yang orang tuanya kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SLTA;

11. Untuk melihat kemajuan program pendidikan dasar sangat perlu di lakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan selanjutnya.

3. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Perlu diketahui bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan subyek pelaku pendidikan, maka perlu adanya upaya yang bersifat terus menerus kepada tenaga pendidik di satuan pendidikan yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang efektif, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tenaga pendidik dan kependidikan perlu memahami prinsip-prinsip interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara aktif sesuai dengan bidang profesinya. Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pelatihan Penguatan Kapasitas Tim Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi sesuai hasil UKG

4. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari berdasarkan permasalahan yang di hadapi tentang kinerja pelayanan pendidikan di dinas pendidikan, maka pada lima tahun mendatang melakukan reformasi tentang peningkatan pelayanan pendidikan meliputi ; peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan administrasi dan ke disiplinian (etos kerja) yang lebih baik, berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memfasilitasi atau mengadvokasi regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan yang berkualitas dengan prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan aspiratif ;

- a. Mengadvokasi peninjauan kembali tentang perda struktur organisasi tata kerja Dinas dalam peningkatan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat distrik membenahi prosedur dan mekanisme kerja, mengajak partisipasi masyarakat dan stakeholder mulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan program-program pendidikan;
- b. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Dinas Pendidikan;
- c. Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- d. Peningkatan Pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan di bidang pendidikan;
- e. Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik berdasarkan mata pelajaran (pengembangan program lintas SKPD Dinas pendidikan dengan BKD);
- f. Penyelenggaraan pelatihan, seminar atau lokakarya
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

5. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian [pengembangan masyarakat](#) yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Dalam rangka meningkatkan jumlah rektualisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya (kegiatan), maka pada lima tahun mendatang akan melakukan pengembangan nilai budaya meliputi :

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. Pemberian dukungan dan kerjasama di bidang budaya

6. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi Pembuatan papan data dan peta BCB/Situs (Papan data)

7. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi/ upaya pemberdayaan terhadap para pelaku dan penggiat seni budaya di daerah, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan kesenian dan budaya daerah.
- b. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
- c. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu pada target kinerja, kebijakan dan strategi yang ditetapkan, sehingga asumsi yang harus terpenuhi sehingga skenario yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, setiap pihak yang masuk dalam kelompok pemangku kepentingan dan kewajiban pendidikan harus terlibat untuk memastikan bahwa strategi yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Dokumen ini harus di review pada tahun ke tiga pelaksanaan, sehingga dapat menyesuaikan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan, apakah sesuai, melebihi atau tidak mencapai target. Dengan demikian, setiap upaya percepatan akan diikuti dengan penyediaan dukungan yang seimbang.

Masukan dan perhatian darisemua pihak menjadi sangat penting untuk berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan.

